

BAB III

UPAYA DOMESTIK PEMERINTAH SELANDIA BARU DALAM PROGRAM COUNTER-TERRORISM

Pada bab ini, penulis akan mendiskusikan berbagai upaya domestic yang dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru dalam program *counter-terrorism*. Upaya tersebut mencakup bidang sosial, keamanan politik, media dan komunikasi publik. Setiap aspek akan dijelaskan secara rinci untuk memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi ancaman terorisme. Penjelasan lebih lanjut mengenai setiap upaya dapat dilihat dalam pembahasan berikut.

3.1 Upaya Sosial

Setelah insiden penembakan massal di Selandia Baru, pemerintah dan masyarakat mengimplementasikan berbagai upaya sosial sebagai bentuk kontra terorisme untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Upaya-upaya tersebut meliputi:

Pertama, memperkuat kohezi dan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Selandia Baru telah diakui sebagai salah satu Negara dengan tingkat solidaritas sosial yang tinggi, namun masih terdapat kerentanan dan masalah mendasar yang belum sepenuhnya teratasi. Selama lima tahun sebelum terjadinya insiden penembakan, organisasi non-pemerintah Dewan Wanita Islam Selandia Baru (IWCNZ) telah menyelenggarakan serangkaian pertemuan dan secara rutin berinteraksi dengan

berbagai lembaga pemerintah mengenai insiden-insiden pelecehan fisik dan verbal yang dialami oleh umat islam, terutama terhadap perempuan yang mengenakan hijab. Kelompok ini menunjukkan keprihatinan yang besar terhadap tingkat Islamofobia dan aktivitas kelompok sayap kanan di Selandia Baru. Mereka telah mengajukan permohonan kepada Komisi Penyelidikan Kerajaan (Royal Commision of Inquiry) agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap Islamofobia, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya serangan tersebut. Setelah pengajuan tersebut dipublikasikan, Komisi Hak Asasi Manusia Negara tersebut menekankan perlunya pemerintah mendengarkan pandangan komunitas muslim untuk memperbaiki kegagalan mereka dalam mengambil tindakan di masa lalu.

Populasi Selandia Baru yang semakin beragam dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa keadaan tersebut akan terus berlanjut dalam kurun waktu 20 tahun mendatang. Keberagaman ini membawa sejumlah peluang dan juga tantangan bagi masyarakat menurut analisis yang dilakukan oleh Profesor Paul Spoonley, peningkatan kelompok etnis tertentu di suatu wilayah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi. Meskipun demikian, tantangan juga muncul seiring dengan keberagaman ini. Ketika keberagaman hadir di suatu wilayah, konflik dapat muncul terkait praktik budaya dan nilai-nilai kewarganegaraan bersama.⁴¹ Selain itu, tidak terhindarkan pula kemungkinan adanya diskriminasi dan politik anti-imigran.

⁴¹ Paul Spoonley, *The New Zealand: Facing Demographic Disruption*, 1st ed. (Auckland: Massey University Press, 2020), https://books.google.co.id/books/about/The_New_New_Zealand.html?id=47vrDwAAQBAJ&redir_esc=y.

Contoh dari kasus serupa dapat dilihat dari tragedi penembakan massal di Selandia Baru. Pelaku melakukan serangan karena menganggap muslim sebagai penjajah di tanah Eropa. Padahal pandangan ini sangat keliru dan tidak berdasar pada fakta historis maupun social.

Upaya menguatkan solidaritas sosial di masyarakat tercermin melalui partisipasi Perdana Menteri dan beberapa perempuan non-muslim Selandia Baru dalam mengenakan hijab selama upacara peringatan pasca-tragedi sebagai tanda dukungan terhadap komunitas muslim.⁴² Respon ini mencerminkan besarnya dukungan dari berbagai masyarakat dan menggambarkan pentingnya solidaritas serta dukungan lintas budaya dalam menghadapi ancaman terorisme. Penggunaan hijab juga dipandang sebagai bentuk nilai kemanusiaan dan persatuan oleh mereka setelah peristiwa tragis tersebut. Selain itu, kehadiran 20.000 individu dalam upacara peringatan untuk menghormati mereka yang telah kehilangan nyawa adalah gambaran dari komitmen yang dimiliki oleh banyak warga Selandia Baru dalam mendukung satu sama lain.⁴³

Salah satu komunitas muslim di Selandia Baru yaitu New Zealand Islamic Information Centre, mengumpulkan uang untuk membantu keluarga muslim yang membutuhkan bantuan negara. Mereka mengumpulkan sekitar 1,5 juta dolar Selandia

⁴² BBC NEWS INDONESIA, "Dukungan Warga Selandia Baru Setelah Serangan Masjid: 'Kita Tak Takut Lagi,'" *Bbc.Com*, last modified 2019, accessed May 14, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47668116>.

⁴³ BBC NEWS Indonesia, "Tersangka Pelaku Penembakan Masjid Selandia Baru Akan Jalani Tes Kejiwaan," *BBC NEWS*, last modified 2019, accessed May 20, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47822996>.

Baru. Untuk ini, mereka menggunakan Launchgood, sebuah situs penggalangan dana yang banyak digunakan komunitas muslim di seluruh dunia.

Selain itu, dilakukan juga upaya untuk membantu psikologis korban dan keluarga para korban muslim pasca tragedy. Hal ini ditujukan untuk memberikan dukungan emosional dan mental kepada mereka yang terkena dampak, memastikan mereka mendapatkan bantuan yang diperlukan untuk pulih dari trauma. Salah satu bentuk dukungan ini adalah Palang merah Selandia Baru memberikan dukungan kepada korban penembakan dan membantu mencari serta menyatukan kembali orang-orang yang terpisah dengan keluarga mereka setelah tragedy di Christchurch. Organisasi Victim Support juga melakukan hal yang sama dengan membantu mereka yang mengalami trauma dan kejahatan serius di Selandia Baru melalui penggalangan dana untuk korban penembakan di Masjid Christchurch. Dengan jumlah donasi yang besar, mereka telah merencanakan untuk mendistribusikan dana tersebut. organisasi ini juga menegaskan bahwa semua dana yang terkumpul akan digunakan sepenuhnya untuk mendukung para korban⁴⁴.

Kedua, memberikan rasa aman dan dukungan kepada umat Muslim dalam pelaksanaan ibadah. Setelah peristiwa penembakan, tidak dapat dipungkiri bahwa umat muslim masih mengalami rasa takut dan kecemasan, khususnya saat melaksanakan ibadah shalat. Tragedi tersebut terjadi pada saat umat muslim sedang

⁴⁴ Maea Lenei Buhre, "Donate, Organize or Show up: How to Help after the New Zealand Massacre," *PBS NEWS*, last modified 2019, accessed July 16, 2024, <https://www.pbs.org/newshour/world/donate-organize-or-show-up-how-to-help-after-the-new-zealand-massacre>.

melakukan ibadah shalat sehingga ingatan akan kejadian tersebut tetap mengganggu mereka ketika mereka sedang beribadah. Melihat hal itu, polisi dan warga setempat memberikan pengamanan dan dukungan kepada umat islam selama pelaksanaan shalat. Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Kota Christchurch melaporkan bahwa jumlah warga yang mengawal jamaah selama shalat lebih besar daripada jumlah jamaah itu sendiri, dengan banyaknya mereka berdiri di belakang barisan perempuan.⁴⁵ Respons ini memberikan rasa aman kepada umat muslim setelah insiden terjadi. Selain itu, sukarelawan internasional juga turut kontribusi besar dengan ikut menemani pelaksanaan shalat termasuk dari Negara-negara seperti Malaysia dan Australia.⁴⁶

Tidak hanya itu, Beberapa geng motor yang terkenal di Selandia Baru seperti The Mongrel Mob, King Cobra, dan The Black Power menunjukkan respons yang sama pasca terjadinya serangan dengan mengirimkan anggota mereka untuk mendampingi jamaah selama pelaksanaan shalat Jumat di luar masjid setelah penembakan. Sonny Fati, yang menjabat sebagai Presiden Mongrel Mob Waikato, menggerakkan anggota geng motornya untuk memberikan perlindungan dan pengawalan di Masjid Jami di Hamilton. Fati menyatakan komitmennya untuk mendukung dan membantu saudara dan saudari Muslim dalam waktu yang diperlukan. Tindakan ini diambil setelah mendengar bahwa banyak dari komunitas

⁴⁵ BBC New Indonesia, "Dukungan Warga Selandia Baru Setelah Serangan Masjid: 'Kita Tak Takut Lagi,'" *BBC News Indonesia*, last modified 2019, accessed April 28, 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47668116>.

⁴⁶ Ibid.

muslim masih mengalami trauma dan ketakutan untuk keluar dan melaksanakan shalat Jumat pasca insiden terorisme. Demikian pula, anggota geng motor The King Cobra juga turut melakukan tindakan serupa dengan mengawal para jamaah di Masjid Al-Masjid Al Jamie di Ponsonby.⁴⁷

3.2 Upaya Politik Keamanan

Menyikapi tragedi ini, pemerintah Selandia Baru di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Jacinda Ardern mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan keamanan dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Langkah-langkah tersebut meliputi:

Pertama, melakukan reformasi hukum melalui peraturan perundang-undang. Sebelum terjadinya insiden di Kota Christchurch, kepemilikan senjata api diizinkan oleh pemerintah termasuk senjata api semi-otomatis, pistol, dan senjata api laras panjang. Selain itu, sebelum insiden tidak adanya persyaratan untuk mendaftarkan sebagian besar senjata api. Namun pasca penembakan massal tersebut, Perdana Menteri Ardern mengumumkan bahwa fokus utama pemerintahan adalah melakukan reformasi terhadap undang-undang senjata api melalui amandemen legislasi yang berlaku. Dalam tiga hari pasca kejadian tragis tersebut, Perdana Menteri Jacinda Ardern memimpin rapat cabinet untuk mendiskusikan berbagai kelemahan dalam kerangka hukum senjata api Selandia baru. Ia komitmen untuk mengumumkan

⁴⁷ CNN Indonesia, “Geng Motor Selandia Baru Bakal Jaga Masjid Selama Salat Jumat,” *CNN Indonesia*, last modified 2019, accessed April 30, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190321141449-113-379429/geng-motor-selandia-baru-bakal-jaga-masjid-selama-salat-jumat>.

rencana reformasi dalam waktu sepuluh hari untuk meningkatkan keamanan masyarakat.⁴⁸ Pada tanggal 21 Maret, enam hari setelah serangan di Masjid Christchurch, Perdana Menteri Ardern bersama Menteri Kepolisian Stuart Nash mengumumkan langkah-langkah baru untuk mengatur penggunaan senjata api di Selandia Baru. Keputusan ini diwujudkan dalam *Arms (Prohibited Firearms, Magazines and Parts) Amendment Bill* serta *Arms Legislation Bill*.⁴⁹

Reformasi pertama yang tercantum dalam *Arms (Prohibited Firearms, Magazines and Parts) Amendment Bill* adalah Undang-undang yang melarang sebagian besar senjata api semi otomatis, termasuk MSSAs (Military Style Semi-Automatic Firearms) yang memiliki karakteristik dan penampilan mirip dengan senjata militer. Larangan ini juga mencakup komponen-komponen yang dapat mengubah senjata api menjadi senjata terlarang, untuk memastikan bahwa senjata tersebut tidak dapat dimodifikasi menjadi lebih mematikan. Pembatasan ini meliputi larangan senapan dengan kapasitas lebih dari lima peluru dan senapan semi-otomatis yang dapat menampung magazen yang dapat dilepas atau magazen internal dengan

⁴⁸ Kira Bensman Monin, "Framing and Agenda Setting Following the Mass Shooting Terror Attack in Christchurch , New Zealand," *Advocates' Forum*, last modified 2020, accessed May 21, 2024, <https://crownschool.uchicago.edu/student-life/advocates-forum/framing-and-agenda-setting-following-mass-shooting-terror-attack>.

⁴⁹ Stuart Nash, "Changing New Zealand's Gun Laws: Expanding the Types of Firearms That Are Banned, and an Amnesty on Surrendering Guns to Police," *New Zealand Parliament*, last modified 2019, accessed May 21, 2024, <https://www.parliament.nz/mi/get-involved/topics/all-current-topics/changing-new-zealand-s-gun-laws-expanding-the-types-of-firearms-that-are-banned-and-an-amnesty-on-surrendering-guns-to-police/>.

kapasitas lebih dari lima peluru. Pembatasan ini dirancang untuk membatasi kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh senjata-senjata tersebut.⁵⁰

Reformasi kedua yang tercantum dalam *Arms Legislation Bill* adalah Undang-undang yang mencakup hukuman yang lebih berat dan pelanggaran baru terkait kepemilikan, penggunaan dan distribusi senjata api, magazen dan bagian-bagian yang terlarang. Undang-undang ini juga memperkenalkan reformasi lebih lanjut terkait penciptaan registrasi senjata api serta peningkatan proses perizinan dan pemeriksaan latar belakang untuk pemilik senjata api. Agar masyarakat mematuhi, pemerintah memperkenalkan periode amnesty di mana pemilik dapat menyerahkan senjata api terlarang tanpa hukuman. Selain itu, skema pembelian kembali dilaksanakan untuk memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik senjata yang menyerahkan senjata api mereka, sehingga mengurangi jumlah senjata berbahaya yang beredar di masyarakat. Ia juga menyatakan bahwa apabila seseorang menyimpan senjata api secara ilegal, mereka akan dijatuhi denda sebesar NZ\$4.000 dan dapat menghadapi hukuman penjara selama tiga tahun.⁵¹ Undang-undang ini resmi diberlakukan pada 12 April 2019, setelah ditandatangani oleh Gubernur Jenderal. Pemerintah juga mengalokasikan sumber daya untuk pembelian kembali, sehingga kompensasi yang

⁵⁰ New Zealand Legislation, “Arms (Prohibited Firearms, Magazines, and Parts) Amendment Bill,” *Parliamentary Counsel Office*, last modified 2019, accessed May 21, 2024, <https://legislation.govt.nz/bill/government/2019/0125/latest/LMS181180.html>.

⁵¹ CNN Indonesia, “Selandia Baru Gelar Operasi Intelijen Pasca Teror Penembakan,” *CNN Indonesia*, last modified 2019, accessed May 21, 2024, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190327110630-113-381065/selandia-baru-gelar-operasi-intelijen-pasca-teror-penembakan>.

diberikan adil dan sesuai dengan nilai pasar dari senjata api yang diserahkan.⁵² Langkah ini diambil untuk meningkatkan efek jera, memastikan bahwa aturan baru ditaati secara ketat dan memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi syarat yang dapat memiliki senjata api.

Kedua, memperkuat sistem intelijen Selandia Baru. Selain amandemen peraturan perundang-undangan, kerja sama antara pemerintah dan badan keamanan Negara menjadi semakin penting pasca insiden penembakan di masjid Christchurch. Beberapa upaya yang dilakukan adalah:

- a) Meningkatkan peran dan penyelidikan New Zealand Security Intelligence Service (NZSIS) dalam pemantauan terhadap potensi ancaman terorisme dan ekstremisme guna mendeteksi serta mencegah kemungkinan serangan terror di masa mendatang⁵³
- b) Kepolisian Selandia Baru akan berpartisipasi dengan masyarakat, mencegah kejahatan, mengumpulkan dan menganalisis intelijen, melakukan penyelidikan, merespons keadaan darurat, bekerja sama dengan mitra domestik dan internasional serta memimpin operasi untuk mengurangi risiko dan menangani ancaman terorisme dalam negeri

⁵² New Zealand Parliament, “Arms Legislation Bill 177-3 (2019),” *New Zealand Parliament Paremata Aotearoa*, last modified 2020, accessed May 21, 2024, <https://selectcommittees.parliament.nz/v/6/fe0ce890-bfca-4a78-8abd-55cf336a5c91>.

⁵³ New Zealand Security Intelligence Service, *New Zealand’s Security Threat Environment 2023* (New Zealand, 2023), <https://www.nzsis.govt.nz/assets/NZSIS-Documents/New-Zealands-Security-Threat-Environment-2023.pdf>.

- c) Kelompok Penilaian Ancaman Gabungan (Combined Threat Assessment Group/CTAG) berperan dalam menilai ancaman teroris seperti menetapkan tingkat ancaman terorisme nasional
- d) Biro Keamanan Komunikasi Pemerintah akan menyediakan dukungan intelijen spesialis untuk investigasi yang dilakukan oleh NZSIS dan Kepolisian Selandia Baru⁵⁴
- e) Biro Penilaian Nasional akan berperan dalam memberikan penilaian independen dan tidak memihak mengenai peristiwa dan perkembangan yang relevan dengan keamanan nasional dan hubungan internasional Selandia Baru

Ketiga, meningkatkan peran pemerintah dalam mencegah aksi terror. Pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk mencegah, mempersiapkan diri, merepon dan memulihkan diri dari serangan teroris atau insiden serupa di Selandia Baru. Oleh karena itu, pemerintah menggunakan beberapa pendekatan strategis dan multi-lembaga untuk melawan terorisme dan ekstremisme kekerasan dengan peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a) Departemen Perdana Menteri dan Kabinet akan menghubungkan dan mengkoordinasikan system kontra terorisme Selandia Baru, termasuk pelaksanaan strategi nasional melawan terorisme dan ekstremisme

⁵⁴ Phil Taylor, "Christchurch Shooting: Security Agencies Were Focused on Islamist Terror, Inquiry Finds," *The Guardian*, last modified 2020, accessed May 22, 2024, <https://www.theguardian.com/world/2020/dec/08/christchurch-shooting-new-zealand-security-agencies-were-focused-on-islamist-terror-inquiry-finds>.

kekerasan, serta mengaktifkan mekanisme koordinasi jika terjadi serangan terror atau insiden serupa

- b) Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan berperan untuk menyelaraskan prioritas kontra terorisme dengan kepentingan kebijakan luar negeri dan kewajiban internasional, memperjuangkan nilai-nilai kita secara global dan membantu menjaga keamanan warga Selandia Baru di luar negeri
- c) Kementerian kehakiman akan memastikan undang-undang kontra terorisme sesuai dengan tujuan dan mencerminkan nilai-nilai Selandia Baru
- d) Layanan Bea Cukai meningkatkan keamanan Selandia Baru melalui identifikasi dan mitigasi risiko lintas batas
- e) Kementerian Perhubungan berupaya dengan mendukung penyelenggaraan system transportasi yang tangguh dan aman
- f) Kementerian pertahanan berperan untuk memastikan bahwa kegiatan pertahanan Selandia Baru mengurangi ancaman terorisme terhadap kepentingan negara, serta mempersiapkan pasukan pertahanan untuk mendukung tanggapan pemerintah terhadap peristiwa terorisme di dalam dan luar negeri
- g) Angkatan Pertahanan Selandia Baru menyediakan kemampuan taktis dan operasional khusus untuk melawan dan menanggapi ancaman teroris

- h) Departemen Dalam Negeri mencegah dan menanggapi konten ekstremis kekerasan yang tidak pantas secara online

Badan-badan utama lainnya yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam melawan terorisme dan ekstremisme kekerasan meliputi Kementerian Pembangunan Sosial, Kementerian Komunitas etnis sejak Juli 2021, Kementerian Kesehatan, Departemen Permasalahatan, Imigrasi Selandia Baru, dan Badan Manajemen Keadaan Darurat Nasional⁵⁵.

3.3 Upaya Media

Secara hakiki, media memainkan peran penting dalam membentuk opini publik, sehingga sangat penting untuk menyajikan realitas yang terjadi. Media dipercaya mampu memberikan perspektif yang adil dalam meliput isu-isu yang sedang berlangsung, baik di tingkat local maupun internasional. Media tidak hanya menampilkan informasi dan gambar, tetapi juga berperan signifikan dalam membentuk opini publik. Media berpengaruh dan terlibat secara aktif dalam proses pembentukan persepsi masyarakat terhadap berbagai isu, melalui cara pemberitaan, penyajian data, dan analisis peristiwa yang disampaikan kepada masyarakat.⁵⁶ Karena media memiliki pengaruh besar, maka sering digunakan sebagai alat untuk menyebarkan stereotip dengan menyebarkan atau memberikan platform bagi ujaran

⁵⁵ Department of the Prime Minister and Cabinet, *New Zealand's Countering Terrorism and Violent Extremism Strategy Bringing Our Nation Together to Protect All New Zealanders from Terrorism and Violent Extremism of All Kinds* (New Zealand, 2022).

⁵⁶ Shepriyani Miftajanna, "Peran Media Massa Barat Membingkai Aksi Terorisme," *Komunikasi* 13, no. 2 (2022).

rasisme dan xenophobia. Media juga merupakan sumber masalah yang signifikan dalam konteks penanggulangan terorisme.

Sering kali, media menyajikan liputan yang tidak sesuai dengan fakta dengan penggunaan gambar tertentu dan penataan keseluruhan cerita berita tentang terorisme yang dapat mengaburkan persepsi publik. Sebuah studi meneliti liputan media domestic terkait serangan teroris yang terjadi di salah satu Negara Amerika Utara selama periode 2011-2015. Temuan dari studi tersebut menunjukkan bahwa serangan yang dilakukan oleh pelaku muslim mendapatkan liputan 4,5 kali lebih banyak daripada serangan lainnya. Selain itu, suatu serangan sering kali ditetapkan sebagai tindakan terorisme ketika pelakunya adalah seorang muslim. Sebaliknya, ancaman yang berasal dari kekerasan yang dilakukan oleh individu dengan pandangan politik sayap kanan sering kali diabaikan dan tidak dianggap sebagai tindakan terorisme.⁵⁷

Banyak ahli yang melihat dampak signifikan media sosial dan media massa dalam mencapai tujuan terorisme saat ini. Wilkinson berpendapat bahwa hubungan antara media dan terorisme bersifat simbiotik. Hal ini dikarenakan kelompok teroris memperoleh popularitas melalui media massa. Banyak ahli melihat bahwa popularitas organisasi teroris meningkat seiring dengan perhatian media yang lebih besar terhadap kelompok teroris.⁵⁸ Selain itu, banyak penelitian menunjukkan bahwa media

⁵⁷ Mutuma Ruteere, *Combating Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance and the Comprehensive Implementation of and Follow-up to the Durban Declaration and Programme of Action*, vol. 72 (New York, 2017), <https://digitallibrary.un.org/record/1304009?ln=en&v=pdf#files>.

⁵⁸ Paul Wilkinson, "The Media and Terrorism: A Reassessment," *Terrorism and Political Violence* 9, no. 2 (2007), <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09546559708427402>.

sosial efektif dalam menyebarkan propaganda dan berita palsu yang memperkuat tujuan teroris untuk menciptakan ketakutan dan ketidakstabilan. Oleh karena itu, bagi kelompok teroris, mempublikasikan tindakan terror mereka di media sangat penting karena keberhasilan tindakan terror bergantung pada sejauh mana ketakutan mempengaruhi aspek psikologis masyarakat. Semakin meluas tekanan yang ditimbulkan, semakin tinggi tingkat keberhasilan yang dicapai dalam melakukan terorisme. Menurut Brian McNair, para teroris menjalankan aksinya agar mendapat publisitas di media, sehingga masyarakat akan memberikan simpati, moral musuh menurun, kekuatan mereka diperlihatkan, ketakutan menyebar, dan terbentuk kekacauan serta huru.⁵⁹

Simbiosis mutualisme yang terjadi antara media dan teroris menjadi hambatan bagi pemerintah dalam upaya menghilangkan terorisme. Hal ini disebabkan oleh peningkatan penjualan media cetak dan rating siaran televisi yang memberitakan tragedy terorisme. Di Negara-negara demokratis, media menganut dua prinsip utama: kebebasan dalam menyiarkan berita dan hak publik untuk mengetahui apa yang terjadi. Ketika berita terorisme disiarkan, media mendapatkan keuntungan komersial dari peningkatan perhatian publik, sementara kelompok teroris mendapatkan publisitas yang mereka inginkan untuk menyebarkan ketakutan dan memperkuat pesan mereka.⁶⁰ Kondisi ini menciptakan tantangan bagi pemerintah dalam

⁵⁹ A Zahid and Ahmad Nauffel, "TERORISME DI ERA KONVERGENSI: Analisis Media Massa Dalam Pemberitaan Terorisme," *Sosiologi Reflektif*, 13, no. 1 (2018): 99–117.

⁶⁰ Wardani, "Peran Media Dalam Pemberitaan Terorisme."

menyeimbangkan antara kebebasan pers dan kebutuhan untuk menjaga keamanan nasional serta mengurangi dampak terorisme.

Stereotip tindakan terorisme sangat erat kaitannya dengan Islam, terutama setelah serangan WTC pada 11 September 2001. Ini merupakan konsekuensi dari paparan media yang seringkali mengaitkan terorisme dengan muslim. Namun, dalam konteks serangan terorisme di Selandia Baru, umat muslim justru menjadi sasaran dan korban dari tindakan terorisme tersebut. Insiden ini menyoroti pentingnya peran media dalam menyajikan laporan yang benar dan akurat, serta dalam mengurangi stereotip negatif yang tidak berdasar terhadap kelompok tertentu.

Pasca serangan di masjid Kota Christchurch, media massa Selandia Baru membagi peliputan mereka ke dalam beberapa fase. Fase pertama meliputi pemberitaan dasar mengenai siapa, apa, kapan, di mana, dan mengapa serangan teroris tersebut terjadi. Fase kedua berfokus pada peliputan tersangka, Brenton Tarrant saat dihadapkan ke pengadilan. Fase ketiga menyoroti media Selandia Baru yang memberikan penghormatan kepada kehidupan para korban serta penderitaan para penyintas dan keluarga mereka. Selanjutnya, fase keempat mencakup introspeksi dan evaluasi nilai-nilai masyarakat Selandia Baru serta reaksi publik terhadap kejadian tersebut. Fase kelima meliputi peliputan pemakaman korban dan upacara peringatan nasional. Fase keenam terus berlanjut yang berkaitan dengan peliputan mengenai penanganan konsekuensi dari serangan tersebut. Fase terakhir adalah

peliputan persidangan Brenton Tarrant yang dijadwalkan pada Juni 2020, di mana ia dihadapkan pada tuduhan pembunuhan dan terorisme.⁶¹

Upaya media Selandia Baru dalam menyajikan berita kejadian terorisme di masjid antara lain: *Pertama*, memfokuskan berita pada korban bukan pelaku. Berdasarkan analisis berita surat kabar Selandia Baru selama seminggu pasca serangan, ditemukan total keseluruhan artikel yang meliput berita terkait insiden ini. Sebanyak 68 artikel atau sekitar 38% berfokus pada topic korban serangan, sementara 49 artikel atau 27% membahas dampak sosial dari serangan tersebut. Hanya 15 artikel atau 8% dari penelitian yang berfokus pada Brenton Tarrant.⁶² Hal ini menggambarkan bahwa media Selandia Baru lebih banyak memberikan perhatian pada korban dan dampak sosial dari serangan tersebut daripada pada pelaku serangan. Fokus yang lebih besar pada korban dan dampak sosial menunjukkan upaya media untuk menghormati mereka yang terkena dampak dan memperhatikan aspek kemanusiaan dari tragedy ini. Selain itu, pendekatan ini dapat membantu mencegah tercapainya tujuan teroris untuk mendapatkan perhatian dan publisitas. Penekanan pada korban dan dampak sosial juga menunjukkan keinginan media untuk mendukung proses penyembuhan masyarakat serta mendorong diskusi yang positif tentang nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas.

⁶¹ Gavin Ellis and Denis Muller, "The Proximity Filter: The Effect of Distance on Media Coverage of the Christchurch Mosque Attacks," *Kotuitui* 15, no. 2 (2020): 332–348, <https://doi.org/10.1080/1177083X.2019.1705358>.

⁶² Ibid.

Kedua, memberikan batasan terhadap penayangan konten yang berhubungan dengan ideologi pelaku. Selain itu, organisasi-organisasi media di Selandia Baru telah bersepakat untuk memberlakukan pembatasan dalam pemberitaan mengenai persidangan Brenton Tarrant, pelaku kejahatan supremasi kulit putih. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menahan penyebaran ideology supremasi kulit putih yang dianut oleh pelaku. Pada tanggal 14 Juni, lima organisasi media terbesar di Selandia Baru menandatangani sebuah perjanjian yang mengharuskan mereka mematuhi serangkaian protocol ketat. Komitmen ini dibuat untuk membatasi penyebaran pandangan dan keyakinan tersangka pembunuh. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh beberapa pimpinan media pemerintah serta swasta. Media pemerintah yang menyetujui perjanjian ini adalah RNZ (Radio New Zealand) dan TVNZ (Television New Zealand). Sedangkan media swasta yang menyetujui perjanjian ini antara lain Mediaworks, NZME (New Zealand Media and Entertainment), dan Stuff. Kelima Media tersebut menyatakan adanya kekhawatiran bahwa pelaku dapat memanfaatkan persidangan sebagai wadah untuk mempromosikan ideologi supremasi kulit putihnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan melalui pembatasan audiens dan paparannya dianggap perlu. Perjanjian tersebut juga mencakup ketentuan bahwa selama persidangan hanya akan diliput oleh jurnalis senior. Selain itu, berita yang ditayangkan tidak akan memuat pernyataan yang memperjuangkan ideologi pelaku teroris, serta tidak akan

menampilkan gambar, symbol, atau isyarat dari terdakwa yang merujuk pada ideology supremasi kulit putih.⁶³

3.4 Upaya Komunikasi Publik

Pasca penembakan massal di masjid Christchurch, pemerintah menerapkan kebijakan penanggulangan terorisme yang melibatkan berbagai sector, yaitu upaya sosial, keamanan dan media. Kebijakan ini diimplementasikan sebagai langkah agar serangan serupa tidak pernah terjadi lagi di masyarakat. Ketiga upaya tersebut dilengkapi dengan strategi komunikasi publik. Hal ini disebabkan oleh peran komunikasi public dalam membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat mengenai pentingnya pencegahan terorisme serta cara mereka dapat berkontribusi dalam menjaga keamanan.

Dalam strategi penanggulangan terorisme, pemerintah dan masyarakat diwajibkan untuk tidak hanya memusatkan perhatian pada insiden terror dan pelakunya saja, melainkan juga mengakui dan memberikan perhatian yang tepat kepada korban dan keluarga yang terkena dampak dari kejadian tersebut. Terutama dalam kasus tragedy penembakan di masjid Kota Christchurch, dimana mayoritas korban adalah muslim, penting mengakui bahwa komunitas muslim lainnya di Selandia Baru dan kerabat korban juga mengalami ketakutan dan kecemasan pasca peristiwa tersebut. Untuk memulihkan kepercayaan dan rasa aman di antara warga

⁶³ Eleanor Ainge Roy in Dunedin, “Christchurch Trial: New Zealand Media Agree to Curb White Supremacy Coverage,” *The Guardian*, last modified 2019, accessed May 26, 2024, <https://www.theguardian.com/world/2019/may/01/christchurch-trial-new-zealand-media-agree-to-curb-white-supremacy-coverage>.

muslim dan komunitas secara keseluruhan, langkah-langkah yang inklusif perlu diambil pemerintah termasuk upaya merangkul mereka dalam proses pemulihan dan memastikan bahwa mereka merasa didukung dan dihargai dalam masyarakat. Langkah-langkah yang diupayakan pemerintah melalui komunikasi publik antara lain:

Pertama, memberikan pernyataan yang memperkuat persatuan antara masyarakat Selandia Baru dan komunitas muslim. Setelah peristiwa penembakan, Perdana Menteri Selandia Baru memainkan peran yang sangat aktif. Dalam setiap pidato yang disampaikannya setelah tragedy, Ardern selalu memulainya dengan mengucapkan “Assalamualaikum”. Contohnya termasuk pidato yang diucapkannya dalam rapat parlemen pada tanggal 19 Maret dan pidato saat mengenang tragedy Chrischurch pada 29 Maret 2019.⁶⁴ Saat memberikan pidato di parlemen dan Masjid Lautoka, Ardern memulai dengan ucapan “Assalamualaikum” di hadapan komunitas muslim, salam yang sering diucapkan antar sesama umat muslim. Tindakan ini, yang belum pernah dilakukan sebelumnya, memiliki tujuan khusus. Ardern ingin menunjukkan bahwa umat muslim dapat menganggap Selandia Baru sebagai rumah mereka, meskipun jumlah muslim di Negara tersebut sangat kecil.

Ucapan salam bagi umat muslim bukanlah sekedar salam biasa, melainkan merupakan ungkapan ungkapan cinta dan kasih sayang kepada sesama muslim.

⁶⁴ Andika Hendra Mustaqim, “Empathy Politics Versus Terrorism: The New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern’S Political Leadership Communication,” *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 4, no. 1 (2019): 61.

Meskipun tampak sederhana, tindakan ini memiliki dampak bagi keluarga para korban, dan niat dari pengucapan tersebut dapat dirasakan oleh keluarga yang sedang berduka. Hal ini membawa dampak positif bagi mayoritas umat muslim. Tindakan Perdana Menteri bertujuan untuk menunjukkan bahwa setiap anggota masyarakat Selandia Baru bukanlah orang lain, melainkan bagian dari Selandia Baru itu sendiri.⁶⁵

Korban utama dalam tragedi ini adalah umat Muslim dan para imigran, namun Jacinda Ardern tidak mengabaikan fakta tersebut. Dalam pidatonya, ia menyatakan “*They will remain with us forever. They are us*” yang merujuk pada para korban serangan. Kata “*us*” menandakan komitmen Ardern untuk merangkul semua warga Selandia Baru tanpa memandang latar belakang etnis atau agama. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa umat muslim diterima di Negara Selandia Baru dan serangan tersebut berdampak kepada seluruh masyarakat setempat.⁶⁶ Hal tersebut menunjukkan solidaritas dan empati yang mendalam dari seorang pemimpin Negara serta menegaskan bahwa keberagaman merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas nasional Selandia Baru.

⁶⁵ Sofhi Fadillah, “UPAYA KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH SELANDIA BARU DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN WARGA MUSLIM PASCA PERISTIWA TEROR DI CHRISTCHURCH,” *Community Development Journal* 4, no. 2 (2023): 5177–5185, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/16456>.

⁶⁶ Abeer Aly El Attar El Attar, “The Representation of Social Actors in Jacinda Ardern’s Parliamentary Speech: A Critical Discourse Analysis of New Zealand Mosque Massacre,” *CDELTA Occasional Papers in the Development of English Education* 66, no. 1 (2019): 253–284.

Selain merangkul muslim melalui kata-katanya, Ardern juga menekankan dalam pidatonya bahwa Selandia Baru adalah Negara yang sangat beragam, dengan lebih dari 200 etnis dan 160 bahasa yang ada saat ini. Ia menegaskan bahwa Selandia Baru akan menyambut siapa saja yang datang ke Negara ini tanpa memandang perbedaan. Namun pintu tersebut akan tertutup bagi mereka yang datang dengan tujuan menyebarkan kebencian dan ketakutan di masyarakat. Orang-orang dengan niat tersebut tidak akan pernah diterima. Menurut Perdana Menteri, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua anggota komunitas. Keamanan tidak hanya berarti bebas dari kekerasan fisik, tetapi juga bebas dari rasa takut terhadap sentiment rasisme dan kebencian yang dapat menciptakan kondisi di mana kekerasan dapat berkembang.

Ardern menegaskan bahwa upaya melawan rasisme, kekerasan dan ektremisme merupakan tanggung jawab seluruh bangsa. Ia menyatakan bahwa tindakan pemerintah saja tidaklah cukup, peran masyarakat sangat penting karena setiap individu memiliki kekuatan melalui kata-kata dan tindakan.⁶⁷ Ardern mendorong setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam melawan rasisme dan kebencian. Ia mengajak masyarakat untuk mengambil tindakan positif dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan harmonis, dimana perbedaan dihormati dan dilindungi. Ardern juga menekankan bahwa tanggung jawab untuk menciptakan

⁶⁷ The Guardian, "Jacinda Ardern's Speech at Christchurch Memorial – Full Transcript," *The Guardian*, last modified 2019, accessed May 31, 2024, <https://www.theguardian.com/world/2019/mar/29/jacinda-arderns-speech-at-christchurch-memorial-full-transcript>.

perubahan sosial tidak hanya terletak pada pemerintah atau institusi tertentu, tetapi juga pada setiap individu dalam komunitas. Selain itu, pernyataan ini juga memberikan ajakan untuk memperkuat semangat kebersamaan dan solidaritas di antara warga Selandia Baru. Dengan mengakui bahwa setiap orang memiliki peran dalam menciptakan keamanan dan kesejahteraan bersama, Ardern mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun masa depan yang lebih damai dan adil, bebas dari kekerasan, rasisme, dan kebencian.

Pernyataan yang membangun tidak hanya disampaikan oleh Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, tetapi juga oleh Wakil Perdana Menteri Selandia Baru, Winston Raymond Peters. Ia menyatakan bahwa pelaku teroris berupaya untuk memecah belah warga Selandia Baru melalui ideology yang dianutnya, namun upaya tersebut tentu saja gagal. Ideology atau kepercayaan apa pun yang mengandung ekstremisme kekerasan akan ditolak oleh warga Selandia Baru.⁶⁸

Kedua, mengimplementasikan kebijakan “*No Name No Face*”. Pasca penembakan yang terjadi, Ardern berjanji untuk tidak pernah memberikan pengakuan apa pun kepada pelaku penyerangan masjid. Dalam pidato pertamanya di parlemen (19/03/2019) setelah insiden penembakan massal di masjid, ia menyatakan, “*He sought many things from his act of terror, but one was notoriety, and that is why you*

⁶⁸ New Zealand Parliament, “Ministerial Statements — Mosque Terror Attacks—Christchurch,” *New Zealand Parliament*, last modified 2019, accessed May 21, 2024, https://www.parliament.nz/en/pb/hansard-debates/rhr/combined/HansDeb_20190319_20190319_08.

will never hear me mention his name”⁶⁹ Ia bersumpah untuk tidak menyebut nama pelaku sebagai upaya untuk menolak tujuan pelaku mencari popularitas di media dan mendapatkan perhatian serta empati masyarakat, yang dapat menyebarkan ideology ekstremis yang ia anut. Oleh karena itu, untuk mencegah tercapainya tujuan pelaku teroris, media dan masyarakat berkomitmen untuk tidak memberikan platform atau sorotan kepada pelaku melainkan mengingat dan menghormati para korban. dengan tidak menyinggung nama pelaku, hal tersebut dapat menyebabkan masyarakat melupakan identitas pelaku dan ideology yang dibawanya, sehingga secara tidak langsung mengurangi pengaruhnya. Oleh karena itu, upaya untuk menyebarkan supremasi kulit putih menjadi sia-sia.

Jacinda Ardern juga menambahkan, “*and to others I implore you, speak the names of those who were lost rather than name of the man who took them.*”⁷⁰ Makna dari pidato tersebut adalah bahwa Ardern menegaskan pentingnya untuk tidak berfokus pada pelaku, melainkan para korban. Dengan demikian, focus dapat diarahkan pada solidaritas, dukungan bagi keluarga korban, serta berbagai upaya untuk melawan ekstremisme dan kebencian.⁷¹ Setelah terjadinya insiden ini, banyak

⁶⁹ Calla Wahlquist, “Ardern Says She Will Never Speak Name of Christchurch Suspect,” *The Guardian*, last modified 2019, accessed May 26, 2024, <https://www.theguardian.com/world/2019/mar/19/new-zealand-shooting-ardern-says-she-will-never-speak-suspects-name>.

⁷⁰ NBC News, “‘You Will Never Hear Me Mention His Name’: Ardern Condemns Christchurch Shooting Suspect,” 2019, accessed May 28, 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=mG7iKGAJriM>.

⁷¹ Haneen Shafeeq Ghabra, “Don’t Say His Name: The Terror Attacks in New Zealand and the Ethics of White Allyship,” *Journal of International and Intercultural Communication* 15, no. 1 (2022): 1–16, <https://doi.org/10.1080/17513057.2020.1849773>.

warga local maupun internasional akan memunculkan pertanyaan tentang tujuan dari serangan tersebut, identitas pelaku, serta pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tragedy tersebut. Namun, seringkali terlupakan bahwa terdapat pihak yang memerlukan perhatian lebih yaitu para korban dan keluarga mereka. Mereka masih berada dalam kondisi trauma dan kecemasan, sehingga membutuhkan dukungan dan semangat dari lingkungan sekitarnya. Apabila focus terlalu ditujukan pada aspek-aspek yang kurang bermanfaat, hal ini dapat mengabaikan kebutuhan para keluarga korban. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memberikan prioritas pada mereka dan memberikan dukungan serta perhatian yang diperlukan dalam menghadapi situasi sulit ini.

